

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk politik atau sosial yaitu makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dalam mempertahankan kehidupan, sehingga kehidupannya dengan masyarakat dan organisasi sosial merupakan sebuah keharusan.<sup>1</sup> Manusia tidak hanya sebagai makhluk sosial, tetapi juga makhluk politik (*zoon politikon*). Dengan istilah *zoon politikon* dimaksudkan bahwa manusia hidup dalam suatu komunitas politik. Sebagai makhluk yang hidup dalam suatu komunitas politik, kesejahteraan bersama (*bonum commune*) dapat tercipta melalui kerja sama yang terjalin antar individu.<sup>2</sup>

Gambaran manusia sebagai makhluk politik (*zoon politikon*) dititik beratkan pada aspek sosialitas manusia. Sebagai makhluk sosial manusia membentuk suatu komunitas hidup bersama atau hidup dalam berkelompok masyarakat tertentu demi mempertahankan keberadaannya dan penyempurnaan. Ketika manusia hidup dalam kelompok, maka di sana akan terjadi pembagian tugas. Pembagian tugas dapat terlaksana jikalau individu-individu yang ada di dalamnya bersedia untuk berpartisipasi

---

<sup>1</sup>Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta 2002, 56.

<sup>2</sup> Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 200.

aktif.<sup>3</sup> Politik sebagai usaha untuk mencapai sesuatu masyarakat yang lebih baik daripada dihadapinya. Sesuai dengan pendapat Peter Merki dalam buku Miriam "*politic, at isbest is a noble queat for a good order and justice*", pendapat tersebut menjelaskan bahwa politik yang dianggap baik yaitu usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Politik juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang mengatur kehidupan kolektifnya dengan baik, hal tersebut berkaitan erat dengan kondisi terbatasnya sumber daya alam sehingga perlu dicari sebuah cara distribusi sumber daya tersebut dengan tujuan agar warga negara dapat merasakan kebahagiaan dan kepuasan.<sup>4</sup>

Namun kadang kala politik dimanfaatkan dalam hal negatif misalnya *money politic*. *Money politic* dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah uang sogok.<sup>5</sup> Politik uang adalah upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

Politik praktis adalah struktur dan upaya untuk memperoleh kekuasaan politik, baik bagi diri sendiri sebagai perseorangan atau atas nama partai. Dalam hal ini seseorang terlibat mencari kedudukan dan

---

<sup>3</sup> Otto Gusti Madung, *Politik: Antara Legalitas Dan Moralitas*, (Maumere: Ledalero, 2009), Vii.

<sup>4</sup> Robi Cahyadi Kurniawan,., *Etika Politik dan Pemerintahan*, Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya, 2020, 2.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), 965.

melaksanakannya dalam satu lembaga negara, sebagai perseorangan atau pun atas nama kelompok/partai. Disebut juga kegiatan politik praktis kalau seseorang membantu orang lain atau partai tertentu untuk memperoleh kekuasaan sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam sistem politik yang ada.<sup>6</sup>

Berpolitik praktis merupakan panggilan awam untuk terlibat dalam struktur dan kegiatan politis, dengan berpartisipasi aktif di trias politika dan bidang politis lain. Faktual bahwa sistem dan kegiatan politik praktis sering disindir memerankan “permainan kotor”, sehingga sering kita dengar bahwa “politik kotor”. Sebutan demikian muncul karena cara dan tindakan berpolitik yang diperankan sering tidak mengindahkan etika politik yang baik dan benar. Politik praktis biasanya secara taktis berusaha memperjuangkan kekuasaan. Politik praktis biasa muncul dalam aktivitas pemilu, warga negara ketika itu melaksanakan hak-hak politiknya, menyuarakan pendapatnya dan juga menjadi bagian dari partai politik baik dalam bentuk keanggotaan parpol, simpatisan, atau juga pemilih parpol tersebut. Penyuaran hak-hak politik warga negara tertentu tidak hanya melalui pemilu. Warga negara bisa juga menyatakan aspirasinya dalam

---

<sup>6</sup> Thahjo Kumoho, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), 155.

forum-forum lain untuk melakukan fungsinya sebagai pemegang kedaulatan rakyat.<sup>7</sup>

Entitas negara dan Gereja adalah dua hal yang tidak dapat disatukan, akan tetapi pada praktisnya keduanya sulit untuk dipisahkan. Oleh karenanya, masih sering kita temukan warga Gereja menggunakan atau memanfaatkan persekutuan untuk meraih kekuasaan politik. Begitu pun sebaliknya, politisi dengan mengatas namakan negara mendatangi masyarakat Gereja untuk mendapatkan dukungan politik.<sup>8</sup>

Gereja sebagai persekutuan orang percaya dipanggil untuk menjalankan suatu kehidupan yang sesuai dengan tuntutan Kerajaan Allah (Markus 1:15; Efesus 4:11;2 Petrus 1:10-11). Hidup yang berpadanan dengan tuntutan kerajaan Allah ialah hidup yang dipimpin oleh Roh Allah yang membuahkas kasih, sukacita, damai sejahtera, keadilan dan kebenaran (Efesus 5:3, Galatia 5:21). Gereja sebagai persekutuan orang percaya adalah persekutuan yang kuat dan tahan uji dalam menghadapi berbagai tantangan, penganiayaan, penderitaan, dan tetap berpengharapan kepada Yesus Kristus. Gereja sebagai persekutuan orang percaya juga terpanggil untuk bersaksi dan memberitakan hal Kerajaan Allah dengan tekun dan setia dalam pelayanan

---

<sup>7</sup>Yong Ohoitmur, "Pelaksanaan Otonomi Daerah: Berpeganglah pada Etika Politik", dalam Anicetus B. Sinaga et al, *Etos dan Moralitas Politik, Seni Pengabdian untuk Kesejahteraan Umum*, (Yogyakarta, Kanisius, 2004), 223-224.

<sup>8</sup>David Ming, "Peranan Gereja dalam Sistem Pemerintahan Yang Baik di Indonesia", *Jurnal Kadesi: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, vol. 1, No. 1(2021), 85-105.

kasih, kebenaran, keadilan dan damai sejahtera bagi semua orang.<sup>9</sup> Gereja sebagai persekutuan orang beribadah bersama dengan Kristus hadir di tengah-tengah dunia untuk memperdamaikan dan memulihkan hubungan Allah dengan manusia yang rusak karena dosa.<sup>10</sup>

Gereja Toraja Jemaat Buale' merupakan jemaat yang anggota jemaatnya rata-rata memiliki hubungan keluarga yang dekat. Jumlah anggota kepala keluarga dalam Gereja Toraja Jemaat Buale' adalah 31 dan jumlah anggota sebanyak 298 Jiwa. Terdiri dari 11 Majelis Gereja yakni 7 Penatua dan 4 Diaken. Gereja Toraja Jemaat Buale' sebelumnya anggota jemaatnya belum terlibat di dalam politik praktis. Pimpinan majelis gereja Toraja Jemaat Buale' memiliki jiwa kepemimpinan yang tegas, sehingga melarang anggota jemaatnya melakukan perpolitikan di dalam gereja serta melarang anggota jemaatnya terlibat dalam dunia politik, menurutnya politik itu tidak baik untuk dilakukan. Pada masa kini sejak tergantinya pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Buale' sudah banyak anggota jemaatnya yang terlibat dalam politik yang berurusan dengan masalah sosial, politik, dan ekonomi. Banyak kebijakan pemerintah yang berhubungan langsung dengan kepentingan warga gereja. Sehingga di dalam gereja Toraja Jemaat Buale' anggota

---

<sup>9</sup> Keputusan Sidang Raya XII PGI, *Lima Dokumen Keesaan Gereja di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), 52.

<sup>10</sup> Clifford Green: diterjemahkan oleh Marie-Claire Barth, Karl Bart: *Teolog Kemerdekaan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 292.

jemaatnya sudah hampir semua terjun di dalam dunia perpolitikan, karena ada beberapa oknum yang dapat mempengaruhi mereka.

Seiring berjalannya waktu Gereja Toraja Jemaat Buale' yang dulunya anggota jemaatnya tidak ikut di dalam dunia perpolitikan, pada masa kini sudah marak melakukan politik dalam gereja. Ada oknum yang mempengaruhi anggota jemaat dalam melakukan politik praktis. Sehingga ketika politik praktis sudah terjadi dalam Gereja Toraja Jemaat Buale' menimbulkan dampak bagi anggota jemaat. Dengan ini penulis tertarik untuk mengamati dan menuliskannya judul "Analisis Dampak Politik Praktis Terhadap Persekutuan Warga Jemaat Di Gereja Toraja Jemaat Buale'Klasis Mengkendek Utara."

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana dampak politik praktis terhadap persekutuan warga jemaat di gereja Toraja Jemaat Buale' Klasis Mengkendek Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak politik praktis terhadap persekutuan warga jemaat di gereja Toraja Jemaat Buale' Klasis Mengkendek Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Praktis

###### a. Manfaat untuk Masyarakat

Agar melalui tulisan ini diharapkan masyarakat dapat kontribusi mengenai dampak dalam dari melakukan politik praktis. Supaya masyarakat dapat melakukan politik dengan positif.

###### b. Manfaat untuk Jemaat

Melalui tulisan ini diharapkan kepada anggota jemaat agar melakukan politik dengan baik dan tidak terlibat dalam *money politic*.

##### 2. Manfaat Akademik

Untuk mengetahui sejauh mana wawasan ataupun cara pandang tentang dampak politik praktis terhadap persekutuan yang ada dalam gereja dan masyarakat. Dan tulisan ini dapat memberikan pemahaman atau wawasan kepada peneliti maupun pembaca mengenai pengaruh serta bagaimana keterlibatan gereja dalam politik.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami tulisan dalam penulisan ini, maka sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** Pada bagian ini membahas tentang Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** Pada bagian ini membahas tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari pengertian, Politik, Konsep-Konsep Politik, Definisi Politik Praktis, Dampak Politik, Definisi Gereja, Tugas Gereja, dan Hubungan Gereja dan Politik.

**BAB III** Pada bagian ini membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari Jenis Metode Penelitian, gambaran umum dan lokasi Penelitian, Tempat Penelitian dan Lokasi Penelitian, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, Informan, Teknik Analisis Data dan Jadwal.

**BAB IV** Pada bagian ini membahas tentang pemaparan dan hasil penelitian bagian ini terdiri dari: sejarah berdirinya Jemaat Buale', Temuan Penelitian dan analisis hasil penelitian tentang Dampak Politik Praktis Terhadap Persekutuan Dalam Gereja Toraja Jemaat Buale' Klasis Mengkendek Utara.

**BAB V** Pada bagian ini membahas tentang Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.



